

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah.

Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam pemetaan pengembangan wilayah, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme diantaranya.

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan permukiman (Suyitno, 2004). Usman (2004), menyatakan ada 4 (empat) strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan di pedesaan, yaitu pembangunan pertanian, industrialisasi pedesaan, pembangunan masyarakat desa terpadu melalui pemberdayaan, dan strategi pusat pertumbuhan. Kesemua strategi pembangunan ini tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan sebuah strategi menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam rangka mencapai kemajuan di wilayah pedesaan. Dengan kata lain, harus melibatkan berbagai pihak agar tercapai pembangunan yang maksimal.

Pembangunan pertanian diseluruh wilayah pedesaan di Indonesia sangat penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan pedesaan dan pertanian adalah sebagai berikut : 1) potensi sumber dayanya yang besar dan beragam, 2) pangsa terhadap pendapatan nasional maupun pendapatan bagi masyarakat desa besar, 3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, khususnya penduduk desa, 4) peranannya yang besar dalam menyediakan pangan bagi masyarakat nasional, khususnya bagi masyarakat desa sekitar, 5) menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Hanani dkk, 2003). Permasalahan yang mendasar dalam pembangunan pedesaan atau pembangunan pertanian adalah : (a) keterbatasan pemilikan lahan, (b) pendapatan masyarakat rendah, (c) produktivitas lahan rendah, (d) banyak lahan tidur/cenderung kritis. Melihat dari hal di atas dalam pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian, pengelolaan lahan kritis merupakan suatu solusi yang strategis untuk menyelesaikan permasalahan.

Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi yang pada akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, permukiman dan kehidupan sosial ekonomi (Mulyadi dan Soepratoardjo, 1975). Menurut Kementerian Kehutanan lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak berfungsi secara baik sesuai peruntukannya sebagai media produksi maupun media tata air. Disimpulkan lahan kritis adalah lahan yang rusak dan tidak produktif, dapat terjadi didataran tinggi, pegunungan, daerah yang miring maupun di dataran rendah.

Penanganan lahan kritis dan sumberdaya air merupakan permasalahan yang multi kompleks, hal ini terkait dengan penanganan lintas sektor mulai dari kehutanan, sumber daya air dan pertanian, serta kesetaraan pengelolaan sumberdaya alam mulai dari hulu, tengah dan hilir. Sebagaimana diketahui penurunan kualitas (*degradasi*) sumberdaya hutan dan lahan serta sumber daya air di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan peningkatan nilai kekritisannya lahan diberbagai wilayah Indonesia, baik dikawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (areal milik masyarakat). Selain itu juga terjadi ancaman degradasi dan kekurangan air

pada musim kemarau serta fenomena banjir pada musim hujan (Ditjen Bangda, 2012)

Saat ini kondisi sumber daya lahan dan lingkungan pertanian di Indonesia telah mengalami kerusakan (kritis/potensial kritis) yang signifikan, dari tahun ke tahun luasnya semakin bertambah. Awal tahun 2000, data luas lahan kritis di Indonesia tercatat ±23,25 juta ha, dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan ±52,25 juta hektar (Ditjen Bangda, 2012). Peningkatan data luas lahan kritis yang sangat besar tersebut menunjukkan laju kerusakan sumber daya lahan semakin mengkhawatirkan akibat pengelolaan yang kurang terkendali. Kerusakan lahan yang semakin nyata dan meluas, ditandai dengan kejadian banjir, kekeringan, dan longsor yang semakin sering.

Tabel 1. Sebaran Lahan Kritis Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

| No | Kabupaten / Kota | Luas Lahan Kritis (ha) | Keterangan |
|----|------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 50 Kota | 105.591 | - |
| 2 | Sijunjung | 73.923 | - |
| 3 | Pasaman | 59.078 | - |
| 4 | Kab. Solok | 44.810 | - |
| 5 | Tanah Datar | 27.210 | - |
| 6 | Darmasraya | 18.205 | - |
| 7 | Sawahlunto | 14.955 | - |
| 8 | Solok Selatan | 15.625 | - |
| 9 | Pesisir Selatan | 4.203 | - |
| 10 | Pasaman Barat | 2.223 | - |
| 11 | Padang Pariaman | 1.742 | - |
| 12 | Agam | 1.163 | - |
| 13 | Payakumbuh | 586 | - |
| 14 | Padang | 193 | - |
| 15 | Mentawai | - | Belum terdata |
| | Jumlah | 369,507 | |

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sumbar, 2016

Luas lahan kritis di Sumatera Barat saat ini mencapai luas 369,507 hektar namun yang telah disurvei baru 214.580 hektar. Dari total 214.580 hektar lahan kritis yang telah disurvei 137.490 hektar berada di luar kawasan hutan dan 77.090 hektar dalam kawasan hutan. Sebaran lahan kritis di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang dilaksanakan pada masa lalu, lebih mengutamakan upaya mengejar perolehan devisa negara, sehingga dalam

mengeksploitasi sumberdaya alam kurang/tidak memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Disamping itu pola pemanfaatan sumberdaya alam, cenderung terpusat pada beberapa kelompok masyarakat atau golongan tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat sekitar lahan kritis tetap miskin dan menanggung resiko bencana apabila tidak dilakukan rehabilitasi lahan.

Upaya penanggulangan lahan kritis/potensial kritis dilakukan pemerintah semenjak tahun 1969 melalui Instruksi Presiden tentang Reboisasi dan Penghijauan. Pada kenyataannya, reboisasi dan penghijauan yang dilakukan belum memuaskan karena kurangnya pemeliharaan tanaman, dan banyak lahan reboisasi/penghijauan yang terbakar, akibat kurangnya perhatian masyarakat untuk memelihara tanaman tersebut, karena manfaatnya tidak dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Tahun 1998 Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya untuk menanggulangi kegagalan dengan berbagai aktivitas dengan pola partisipatif, diantaranya melalui program hutan kemasyarakatan, hutan tanaman industri, gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan nasional, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat. Kegiatan ini belum memberikan hasil yang optimal karena segala upaya yang telah dilakukan semuanya atas dasar keinginan pemerintah (Top Down) bukan keinginan masyarakat sekitar lahan (Bottom Up) dan dalam implementasinya selalu diserahkan kepada pihak swasta serta berorientasi pada tanaman bukan kepada lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar lahan. Masyarakat terlibat hanya sebagai pekerja upahan dalam proses penanaman tanaman dilokasi kegiatan (Ditjen Bangda, 2012)

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dimasa depan adalah bagaimana memanfaatkan dan memelihara sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang berkaitan dengan makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan adil (Surna, TD dan Harry. HA. 1992). Setelah reformasi tahun 1998, Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional) dan KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan) berkonsultasi dengan banyak organisasi termasuk yang berkepentingan dengan kehutanan. Akhirnya

Bappenas merevisi rancangan strategi Indonesia mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan pengelolaan lahan kritis sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan (Brown. 2004).

Kenapa lahan kritis dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dalam mengurangi angka kemiskinan, Maturana, 2004 menyatakan :

1. Masyarakat yang tinggal di hutan/pinggir hutan merupakan salah satu kelompok masyarakat miskin terbesar di Indonesia. Kebanyakan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan negara, sekitar 48,8 juta orang yang tinggal disekitar kawasan hutan negara sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya di anggap miskin karena sebahagian besar sumber mata pencahariannya bersumber dari hutan.
2. Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun, karena sulitnya komunikasi dan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan (kebutuhan dasar) serta akses ke pasar.
3. Hutan merupakan sumberdaya penting bagi orang miskin, karena sebagai sumber pangan, bahan bangunan dan bahan lainnya bagi rumah tangga mereka
4. Hutan menyediakan pelayanan ekosistem yang mendasar bagi penghidupan dan kesejahteraan penduduk disekitar hutan, khususnya yang miskin.
5. Hampir semua lahan dikawasan hutan kritis/cenderung kritis dikuasai oleh negara.

Teori Pembangunan bergeser dari paradigma lama ke paradigma baru. Pemikiran pembangunan yang sebelumnya adalah membangun untuk rakyat (*development for people*) bergeser kearah pemikiran membangun bersama rakyat (*development with people*), dan akhirnya pembangunan oleh rakyat (*development by people*). Begitu pula dengan perkembangan pemikiran dalam konsep pembangunan wilayah yang bergeser dari pembangunan datang dari atas (*development from above*) kepada pembangunan dari bawah (*development from below*).

Ostrom (1990), mengatakan secara prinsipil pengelolaan sumberdaya berkelanjutan memerlukan (1) Aturan yang sesuai dengan kondisi sumberdaya. (2) Kejelasan batasan wilayah dan pengguna (hak atas sumberdaya), (3) Akuntabilitas sistim pemantauan (4) Adanya sangsi yang bersifat gradual (5) Tersedianya penyelesaian konflik biaya rendah (6) Keterlibatan pihak-pihak yang terkait sehingga tercapai kesepakatan antara individu dengan yang terlibat (7) Hadirnya sistim kepemimpinan yang mendukung. Konsep *Desentralisasi* pengelolaan diyakini memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumberdaya.

Hal inilah yang melatar belakangi pihak Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Program Pengembangan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM), karena pengembangan penanganan lahan kritis tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan hutan, tanah dan air saja, akan tetapi memperhatikan juga aspek masyarakat yang berada dalam lingkaran lingkungan tersebut. Jika perilaku pelaku ekosistem tidak dilibatkan sejak awal dalam pengembangan penanganan lahan kritis, maka pemanfaatan sumber daya air yang melampaui daya dukung lahan akan mengalami kerusakan dan terjadi degradasi lapisan tanah yang pada akhirnya dapat membahayakan fungsi hidrologi, produktivitas lahan, tata air dan dapat mempengaruhi sosial ekonomi sehingga penanganan kemiskinan akan sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan data Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Laporan Konsultan Bantuan Teknis (Bantek) PLKSDA-BM Regional I Sumatera, 2016), pada tahun 2012 s/d 2016 (*closing date*) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri melaksanakan program penanganan lahan kritis dan pengentasan kemiskinan melalui Program PLKSDA-BM. Tujuan dari Program ini untuk memperbaiki lahan berpotensi kritis menjadi lahan produktif menghasilkan nilai ekonomis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan melibatkan kerjasama dengan multipihak (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM) dengan sasaran, meliputi :

- a) Meningkatnya produktivitas lahan pada lokasi *pilot project*
- b) Terciptanya area resapan air

- c) Meningkatnya pendapatan masyarakat/petani peserta program dan pihak lain yang terlibat program dalam jangka panjang
- d) Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani pengelola lahan kritis
- e) Meningkatkan kerjasama multipihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pemerintah
- f) Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil produktifitas lahan

Program ini melakukan perubahan dalam implementasinya dengan menitik beratkan pada penguatan kelembagaan masyarakat secara partisipatif dan ketersediaan air serta peningkatan pendapatan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Peranan pemerintahan hanya memfasilitasi program melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selama 5 (lima) Tahun Anggaran. PLKSDA-BM merupakan konsep baru dalam pendekatan pembangunan wilayah pedesaan, yaitu pendekatan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak. Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) hanya berperan sebagai fasilitator (memfasilitasi) sedangkan segala keputusan yang akan dilaksanakan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui kelompok untuk mencapai keberhasilan program.

Berdasarkan laporan Konsultan Bantuan Teknis (Bantek) PLKSDA-BM Regional I Sumatera bahwa capaian hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel. 2. Pelaksanaan Program PLKSDA-BM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2016.

| No | Kabupaten | Tahun Pelaksanaan (Ha) | | | | | Total Luas (ha) | Jumlah Poktan (Unit) | Jumlah Petani (orang) |
|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 1 | Solok | 39.00 | 22.00 | - | - | 15 | 76.00 | 7 | 80 |
| 2 | Solok Selatan | 42.00 | - | - | - | 7 | 49.00 | 4 | 36 |
| 3 | Tanah Datar | - | 18.00 | - | 5.00 | 7 | 30.00 | 4 | 96 |
| 4 | 50 Kota | - | - | 10.00 | 10.00 | 8 | 28.00 | 3 | 61 |
| 5 | Pdg Pariaman | - | - | 10.00 | 8.00 | - | 18.00 | 2 | 23 |
| Jumlah | | 81.00 | 40.00 | 20.00 | 23.00 | 37.00 | 201.00 | 18 | 296 |

Sumber : Laporan Konsultan Bantuan Teknis (Bantek) PLKSDA-BM Regional I Sumatera, 2016

Capaian hasil pelaksanaan program mulai tahun 2012 – 2016 pada Tabel 2, Kabupaten Tanah Datar mendapatkan program seluas 30 ha dengan jumlah petani peserta program 96 orang (Tabel 3), masing-masing peserta mendapatkan rata-rata luas garapan (milik Ulayat Suku/ Nagari/Negara) yang di serahkan pemerintah

untuk dikelola seluas 0,33 ha, luasan ini tergolong kecil karena luas lahan yang layak dikelola petani jeruk minimal 1 ha (Balitjestro. 2016) sedangkan lahan kritis di Kabupaten Tanah Datar cukup luas yaitu 27.210 ha (Tabel 1).

Tabel 3. Sebaran Pelaksanaan Program PLKSDA-BM di Kabupaten Tanah Datar

| No | Kanagarian | Tahun Pelaksanaan (Ha) | | | | | Total Luas (ha) | Jumlah Poktan (Unit) | Jumlah Petani (orang) |
|----|---------------|------------------------|-----------|------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 1 | Tjg. Bonai | - | 13 | - | - | - | 13 | 1 | 32 |
| 2 | Paninjauan | - | 5 | - | - | 7 | 12 | 1 | 44 |
| 3 | Batipuah | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 20 |
| | Jumlah | - | 18 | - | 5 | 7 | 30 | 3 | 96 |

Sumber : Laporan Konsultan Bantuan Teknis (Bantek) PLKSDA-BM Regional I Sumatera, 2016

Kemudian dari Tabel 4 di bawah terlihat tanaman diseluruh lokasi seluas 30 ha ditanami dengan komoditi tanaman jeruk manis Gunung Omeh sebanyak 11.400 batang. Tanaman jeruk manis Gunung Omeh berproduksi pada umur 2 (dua) tahun, secara tidak langsung lokasi yang tanam pada tahun 2013 sudah berproduksi dan memberikan kontribusi pendapatan kepada petani pengelola.

Terkait dengan Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan tentang pembangunan berbasis masyarakat (*Community Based Development*) dalam pengelolaan Lahan Kritis ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik Program PLKSDA-BM dan Manfaatnya Terhadap Pendapatan Masyarakat : Kasus Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Salah satu Kabupaten lokasi program PLKSDA-BM di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar (Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara). Kegiatan dimulai tahun 2012 dan *closing date* 2016 (*pilot project*), keberlanjutan program diserahkan sepenuhnya kepada Poktan pengelola program dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4. Jenis Komoditi Tanaman Pokok Yang di Tanam di Sumatera Barat Program PLKSDA-BM Tahun 2012 – 2016

| No | Kabupaten | Jenis Komoditi Tanaman Pokok | Jumlah (Batang) | Keterangan |
|-----------|---------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | Solok | Durian Motong | 3.379 | - |
| | | Rambutan Binjai | 680 | - |
| | | Sirsak Ratu | 9.260 | - |
| | | Sawo Sumpur | 662 | - |
| | | Lengkeng | 850 | - |
| | | Alpukat | 450 | - |
| | | Jeruk Keprok/Madu | 4.800 | - |
| | | Manggis | 450 | - |
| | | Sub Total | 20.531 | - |
| 2 | Solok Selatan | Manggis | 1.500 | - |
| | | Jeruk | 8.800 | - |
| | | Sirsak | 500 | - |
| | | Jambu biji | 200 | - |
| | | Sub Total | 11.000 | - |
| 3 | Tanah Datar | Jeruk | 11.400 | - |
| | | Sub Total | 11.400 | - |
| 4 | 50 Kota | Durian Montong | 600 | - |
| | | Sirsak Ratu | 1.100 | - |
| | | Jeruk | 7.200 | - |
| Sub Total | 8.900 | - | | |
| 5 | Pdg Pariaman | Manggis | 1.460 | - |
| | | Mangga | 500 | - |
| | | Sub Total | 1.960 | - |
| | | T o t a l | 53.791 | |

Sumber : Laporan Konsultan Bantuan Teknis (Batek) PLKSDA-BM Regional I Sumatera, 2016

B. Rumusan Masalah

Secara teoritis penanganan lahan kritis berbasis masyarakat bermanfaat untuk mengangkat dan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan ini yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lahan. Masyarakat diberikan lahan (Pemerintah, Suku/Ulayat) selama 20 tahun untuk dikelola serta diberikan bantuan bibit dan sarana produksi untuk pemeliharaan tanaman pokok serta tanaman sela selama 5 (lima) tahun.

Dengan demikian secara bertahap akan berkurang angka luas lahan kritis dan kemiskinan. Akan tetapi apakah di lapangan sudah sesuai dengan harapan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat pengelolanya, belum diketahui secara pasti. Sejak diluncurkannya program PLKSDA-BM di Sumatera Barat

tahun 2012, sampai saat ini belum ada penelitian/kajian yang mengemukakan perkembangan dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat peserta program PLKSDA-BM.

Berdasarkan uraian di atas dalam mewujudkan pembangunan berpusat kerakyatan (berbasis masyarakat) maka perlunya dilakukan penelitian terhadap dampak Program PLKSDA-BM apakah program ini dapat memberi manfaat terhadap pendapatan masyarakat. Beberapa pokok pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan Program PLKSDA-BM di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana dampak program PLKSDA-BM terhadap pendapatan masyarakat di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
3. Apa permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam program PLKSDA-BM untuk peningkatan pendapatannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui gambaran pelaksanaan Program PLKSDA-BM di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
- b. Mengetahui dampak program PLKSDA-BM terhadap pendapatan masyarakat yang terlibat langsung di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam peningkatan pendapatan pada Program PLKSDA-BM di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dalam pengembangan ilmu berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dari lahan kritis.
2. Manfaat praktis (guna laksana), penelitian ini diharapkan :

- a. Bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan Program PLKSDA-BM ke depannya
- b. Untuk pemerintah bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan lahan kritis berbasis masyarakat.

